



**Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**DISKOP
UKM**
kutai kartanegara

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memberi manfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 30 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH,



Muhammad Reza, S.T., M. Si.

Pembina / IV a

NIP. 19821229 200604 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- A. Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Masih belum memadai dalam mengelola Koperasi;
- B. Usaha yang dikelola Koperasi dan belum sesuai dengan Kebutuhan anggota dan Masyarakat dan Pengelola Koperasi belum mampu menangkap Peluang Usaha sesuai dengan Potensi;
- C. Rendahnya Tingkat ketaatan Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
- D. Belum maksimalnya Pertumbuhan Izin Simpan Pinjam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- E. Masih Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro;
- F. Masih rendahnya Pelaku Usaha dalam Akses Pembiayaan Legal;
- G. Kualitas Produk UMKM belum sesuai standar (Produk dan Kemasan);
- H. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Perizinan dan sertifikasi;
- I. Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha Mikro dalam mengakses Pemasaran;
- J. Kurang optimalnya dukungan terhadap pengembangan UMKM.

4. Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan, yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.



- C. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- D. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- E. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- F. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- G. UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 83 orang untuk PNS 55 orang dengan perincian Pejabat Struktural 4 orang Pejabat Fungsional 3 Orang, Pelaksana 76 orang, dan PPPK 28 orang yang terdiri dari :

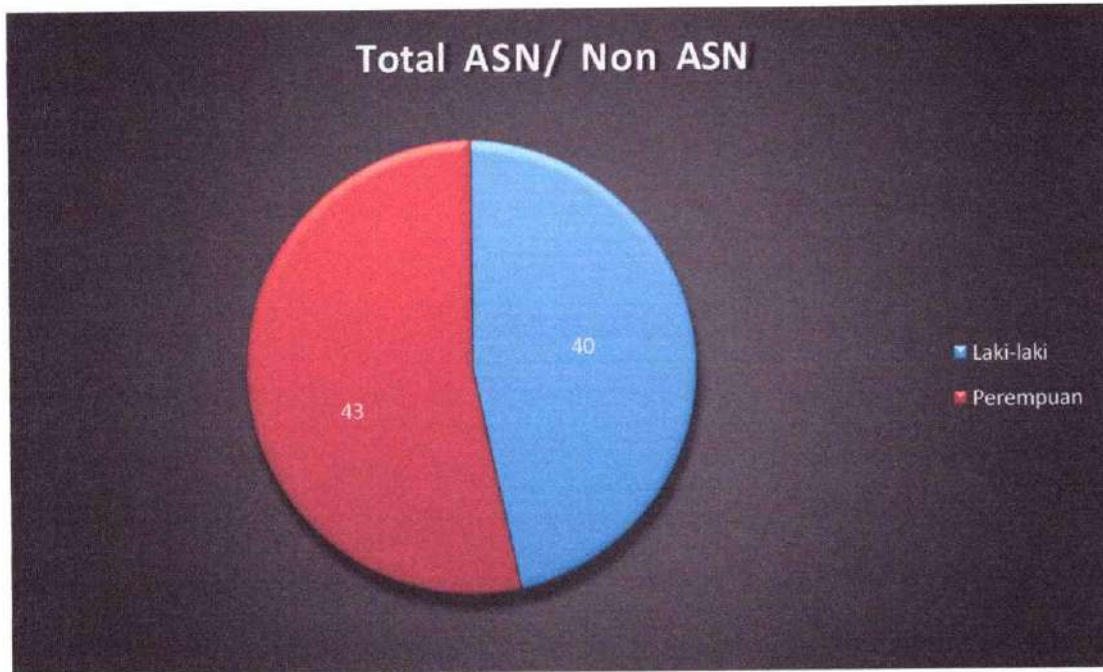
Laki –laki	: 40 orang
Perempuan	: 43 orang
Total ASN	: 83 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama : 0 Orang
 - Jabatan administrator : 3 Orang
 - Jabatan Pengawas : 1 Orang
-
- 4 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional

- Pengawas Koperasi Ahli Muda : 3 Orang



Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					Jumlah
		Sekretariat	Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro	JF	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PNS	22	9	12	9	3	55
	PPPK	12	9	3	4	0	28
Jumlah Perbidang ASN		34	18	15	13	3	83

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	S-2	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	S-1	1	-	-	-	8	1	3	11	-	-	-	1	-	-	-	-	25
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	SD/SLTP/SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-	-	-	-	23
Jumlah		4	1	0	0	8	1	3	13	0	1	0	24	0	0	0	0	55

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	4	1	0	0	8	1	3	13	0	1	0	24	0	0	0	0	55
		5				25				25				0				55 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	-	1	2	-	3
2	Belum Diklat PIM	-	-	-	1	1
JUMLAH		0	1	2	1	4 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan UKM Kab.
Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA AWAL 2021	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET AKHIR RESNTRA 2026
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	82	82	82	82
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	0.23	0.94	1,01	3,20
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP UKM	%	67.76	77	80,00	80,00



Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persen	82
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan wirausaha	Persen	0,93
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3



8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65



15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.15.320.798.299	APBD
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.690.000.000	APBD
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.1.125.000.000	APBD
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.300.000.000	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp.1.300.000.000	APBD
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Rp.5.150.000.000	APBD



KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

7 PROGRAM PENGEMBANGAN
UMKM Rp.4.180.000.000 APBD

JUMLAH ANGGARAN


Rp.28.065.798.299

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


H. THAUFIQ ZULFIAN NOOR,
S.Pi., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197401222001121002



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, yang mengacu kepada **Permenpan RB No. 53 Tahun 2014** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah



Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	82	82	100
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0,93	1.33	141
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77,00	66,33	86
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0,00	0
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	96,79	110
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Lavel	3	3.83	128
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1,00	0,00	0



9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48,00	48,00	100
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,70	3,26	88
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77,00	65,92	86
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65,00	71,51	110
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100,00	100



16.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	104
17.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,10	2,71	114

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang **baik**, yang ditandai dengan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pada sasaran yang berkaitan dengan peningkatan kinerja ekonomi dan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat optimal. Persentase koperasi aktif terealisasi sesuai target (100%), yang mengindikasikan konsistensi dalam pembinaan dan pengawasan koperasi. Sementara itu, pertumbuhan wirausaha baru mencapai 141% dari target, yang menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha serta memperluas basis ekonomi masyarakat.

Pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian sebesar 110% dari target, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, indikator pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) tidak mencapai target (0%), yang menunjukkan belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kondisi ini menjadi perhatian karena partisipasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, serta implementasi Satu Data Indonesia yang masing-masing mencapai 100%. Selain itu, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 128% dari target, yang menunjukkan

semakin kuatnya sistem pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja.



Namun demikian, indikator akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten masing-masing hanya mencapai 86% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*) masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Pada sasaran reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten mencapai 110% dari target, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, indikator terkait inovasi perangkat daerah tidak menunjukkan realisasi (0%), dikarenakan terhambatnya proses input SINOVIK yang melewati batas waktu. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan yaitu “JUKUT (Jumlah UMKM Kutai Kartanegara / KUMALA”, Dimana inovasi tersebut menunjang dan mendukung kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pada sasaran yang berkaitan dengan kontribusi terhadap pembangunan daerah, capaian menunjukkan hasil yang positif, dimana angka kemiskinan berhasil ditekan melebihi target (104%) serta tingkat inflasi daerah dapat dikendalikan dengan capaian 114%. Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara program perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya pelaksanaan partisipasi publik, rendahnya pengembangan inovasi daerah, serta belum maksimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, penguatan implementasi SAKIP, optimalisasi pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta pengembangan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebesar 121%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Sangat TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kriteria Penilaian
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	82	82	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	0,93	1,33	141	Sangat Tinggi
Rata - Rata						121	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi Aktif

Tabel 3.1.2
Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran Konsistensi





Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase koperasi aktif diukur dengan dua indikator, yaitu jumlah koperasi aktif sebagai pembilang yang dibandingkan dengan jumlah koperasi secara keseluruhan sebagai penyebut. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keaktifan koperasi dalam menjalankan usahanya secara operasional dan kelembagaan.

Perkembangan persentase koperasi aktif dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat hingga Tahun 2024. Pada Tahun 2020, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 82,11%, kemudian meningkat secara bertahap pada Tahun 2021 menjadi 82,50%, Tahun 2022 sebesar 82,87%, dan Tahun 2023 mencapai 83,16%. Peningkatan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan persentase koperasi aktif sebesar 83,43%, yang mencerminkan semakin baiknya tingkat keaktifan koperasi dari tahun ke tahun.

Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi sedikit penurunan persentase koperasi aktif menjadi 82%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya jumlah koperasi aktif, melainkan karena adanya peningkatan jumlah koperasi secara signifikan yang belum seluruhnya dapat dikategorikan aktif.

Secara absolut, jumlah koperasi aktif justru mengalami peningkatan cukup besar dari 564 unit pada Tahun 2024 menjadi 798 unit pada Tahun 2025, seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi secara keseluruhan dari 676 unit menjadi 974 unit.

Penambahan jumlah koperasi pada Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan koperasi baru, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta bertambahnya koperasi konvensional lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Ke depan, diperlukan upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan agar koperasi-koperasi baru tersebut dapat segera aktif dan berkontribusi secara optimal, sehingga persentase koperasi aktif dapat kembali meningkat.



Tabel 3.1.3

Sebaran Koperasi Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	44	37	7	-	4
2	KEMBANG JANGGUT	47	45	2	-	12
3	KENOHAN	27	26	1	-	4
4	MUARA WIS	16	15	1	-	0
5	KOTA BANGUN	39	37	2	-	6
6	KOTA BANGUN DARAT	10	10	0	-	0
7	MUARA KAMAN	73	60	13	-	20
8	MUARA MUNTAI	32	29	3	-	0
9	SEBULU	60	45	15	-	2
10	TENGGARONG	178	130	48	-	17
11	TENGGARONG SEBERANG	57	44	13	-	3
12	LOA KULU	70	65	5	-	5
13	LOA JANAN	48	32	16	-	4
14	SANGA SANGA	36	19	17	-	1
15	MUARA JAWA	40	31	9	-	3
16	SAMBOJA	65	53	12	-	4
17	SAMBOJA BARAT	15	14	1	-	1
18	ANGGANA	30	27	3	-	0
19	MUARA BADAQ	54	49	5	-	1
20	MARANGKAYU	33	30	3	-	2
JUMLAH		974	798	176	-	89



3.1.4 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru



Indikator persentase pertumbuhan wirausaha baru digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dari tahun ke tahun sebagai salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah usaha mikro di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah usaha mikro tercatat sebanyak 58.720 unit dan meningkat menjadi 59.120 unit pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah usaha mikro kembali meningkat menjadi 59.788 unit. Sejalan dengan peningkatan tersebut, persentase pertumbuhan wirausaha baru mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2023 sebesar 0,68%, menurun menjadi 0,31% pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 0,82%.

Peningkatan pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam mendorong lahirnya pelaku usaha baru. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, antara lain pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran.

Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut masih relatif rendah, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mendorong penciptaan wirausaha baru, khususnya melalui penguatan ekosistem kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pasar.

Dengan demikian, ke depan diharapkan pertumbuhan wirausaha baru tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mampu menghasilkan pelaku usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah.



3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Capaian indikator ini jika dibandingkan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	82,%	83,43%	102 %	82%	82%	100%	
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0,46 %	0,31%	67,39%	0,94%	1,33%	141,49%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2024 untuk melihat tren perkembangan capaian kinerja pada masing-masing indikator.

Secara umum, perbandingan kinerja menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan capaian kinerja pada beberapa indikator strategis, meskipun terdapat indikator yang mengalami penurunan capaian.

Pada indikator Persentase Koperasi Aktif, capaian kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 102% dengan realisasi sebesar 83,43% dari target 82%. Sementara itu, pada Tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi sebesar 82% dari target yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian pada Tahun 2025 sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024, namun tetap mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan stabilitas dalam menjaga tingkat keaktifan koperasi di daerah.

Selanjutnya, pada indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru, terjadi peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan. Pada Tahun 2024, realisasi kinerja hanya mencapai 0,31% dari target 0,46% dengan persentase capaian sebesar 67,39%, yang menunjukkan bahwa target belum tercapai. Namun pada Tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 1,33% dari target 0,94% dengan capaian sebesar 141,49%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang sangat signifikan dalam upaya mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro dan kewirausahaan yang lebih efektif pada Tahun 2025, baik melalui pelatihan,



pendampingan, maupun fasilitasi akses permodalan dan pemasaran.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja, khususnya pada indikator pertumbuhan wirausaha baru yang mengalami peningkatan signifikan dari tidak tercapai menjadi melampaui target. Sementara itu, indikator koperasi aktif menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten dalam mencapai target yang ditetapkan.

Ke depan, upaya peningkatan kinerja perlu difokuskan pada menjaga konsistensi capaian yang telah baik serta meningkatkan kualitas intervensi program agar capaian kinerja tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun				Kondisi akhir realisasi Renstra	Tingkat Kemajuan (%)
		2022	2023	2024	2025		
Persentase Koperasi Aktif	82,00%	82	82	82	82%	82	100%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,20%	42.23	0.44	0.31	1,33%	44.31	1384.7%

* Lonjakan realisasi target sasaran pada tahun 2022 terjadi akibat adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) COVID-19, yang secara signifikan mendorong peningkatan jumlah dan aktivitas wirausaha baru sehingga capaian kinerja mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra/RPJMD), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan tingkat kemajuan yang bervariasi.

Untuk indikator **Persentase Koperasi Aktif**, target akhir Renstra ditetapkan sebesar 82,00%. Realisasi kinerja dari tahun 2022 hingga 2025 secara konsisten telah mencapai angka 82%, sehingga pada kondisi akhir tahun 2025 indikator ini telah memenuhi target yang



ditetapkan. Dengan demikian, tingkat kemajuan indikator ini mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi telah berjalan optimal dan sesuai dengan perencanaan.

Sementara itu, pada indikator Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru, target akhir Renstra ditetapkan sebesar 3,20%. Namun demikian, realisasi kinerja menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian sebesar 42,23% pada tahun 2022, kemudian menurun pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 0,44% dan 0,31%, serta kembali meningkat menjadi 1,33% pada tahun 2025. Secara kumulatif, capaian indikator ini menunjukkan kondisi akhir sebesar 44,31%, dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi yaitu 1384,7% dibandingkan target yang ditetapkan.

Tingginya capaian pada indikator pertumbuhan wirausaha baru ini menunjukkan bahwa secara agregat kinerja telah melampaui target jangka menengah. Namun demikian, adanya fluktuasi capaian tahunan mengindikasikan bahwa keberlanjutan dan konsistensi program masih perlu diperkuat agar pertumbuhan wirausaha baru dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target jangka menengah. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi serta kualitas capaian kinerja di masa mendatang.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan standar nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Standar Nasional		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	82%	82%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0,94%	1,33%	141,49%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja yang diukur belum memiliki acuan atau pembanding berupa standar nasional yang ditetapkan secara spesifik. Oleh karena itu, evaluasi kinerja lebih difokuskan pada pencapaian terhadap target internal yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

Pada indikator persentase koperasi aktif, target kinerja Tahun 2025 sebesar 82% dan realisasinya juga mencapai 82%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut telah sesuai dengan target yang direncanakan. Namun demikian, karena tidak tersedia standar nasional sebagai pembanding, maka tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait posisi capaian tersebut dalam skala nasional.

Selanjutnya, pada indikator persentase pertumbuhan wirausaha baru, realisasi kinerja mencapai 1,33% dari target sebesar 0,94%, dengan persentase capaian sebesar 141,49%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, sama halnya dengan indikator sebelumnya, tidak adanya standar nasional menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan secara eksternal untuk menilai daya saing atau posisi kinerja daerah terhadap daerah lain secara nasional.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target pada beberapa indikator, keterbatasan data standar nasional menjadi kendala dalam melakukan evaluasi komparatif secara lebih luas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyusunan atau pemanfaatan benchmark nasional agar kinerja perangkat daerah dapat diukur tidak hanya berdasarkan target internal, tetapi juga dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan ataupun Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

a. Persentase Koperasi Aktif

Faktor Pendorong Keberhasilan :

1. Adanya Kegiatan pendampingan dan Memonitoring Rapat Anggota Koperasi ketaatan Koperasi dalam melaksanakan kewajibannya salah satunya Rapat Anggota tahunan, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 26 ayat 1 bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.



DOKUMENTASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN 2025





- Adanya Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Kab. Kutai Kartanegara





3. Melaksanakan Pelatihan bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola dan anggota Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, sesuai dengan prinsip - prinsip koperasi.

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Digitalisasi Pelaporan Koperasi melalui Pembuatan Akun ODS Mandiri Koperasi di Ruang Digitalisasi di Kab. Kutai Kartanegara





4. Adanya kegiatan-kegiatan Pendampingan kepada Pengurus Koperasi baik di Sektor Pertanian dan Koperasi di Sektor usaha lainnya dan memberikan bimbingan teknis tentang Perkoperasian Monitoring, Pendampingan Penyusunan Laporan, Sinkronisasi, Peralihan Penggunaan Dana Bergulir LPD;
5. Adanya kegiatan dukungan Sertifikasi Pegelola Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Terjadinya in-konsistensi penyelenggaraan rapat anggota tahunan secara rutin setiap tahunnya;
2. Kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus seperti laporan keuangan koperasi yang harus dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
3. Minimnya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian atau Bimbingan Teknis Perkoperasian.

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemahaman kepada pengelola koperasi tentang kewajiban melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal sekali dalam setahun;
2. Percepatan pendampingan penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi sebagai bahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota melalui rapat anggota tahunan;
3. Meningkatkan anggaran pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis perkoperasian;

b. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Faktor Pendorong :

Faktor pendukung atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Pembinaan langsung kelapangan berhadapan dengan pelaku usaha mikro;
2. Pelaku Usaha Mikro antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
3. Pelaku usaha mikro yang pro aktif atas kesadaran untuk memiliki legalitas usaha;
4. Dukungan dari perangkat daerah dan instansi terkait diwilayah UMKM berada.



Dokumentasi Pemberdayaan Usaha Mikro





Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Jadwal yang telah ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain;
2. Kurangnya SDM yang Kompeten;
3. Sarana Prasarana dan jaringan internet kurang mendukung;
4. NIK UMKM sudah terdaftar di kegiatan lain sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut untuk pembuatan legalitas.
5. Kurangnya informasi akses mengikuti pelatihan, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, kemitraan, serta desain teknologi

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Menyesuaikan anggaran;
2. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Dukungan sarpras dan Jaringan Internet mandiri;
4. Pembuatan NIB dibantu tim dari DPMPTSP;
5. Dukungan NPWP oleh KPP Pajak Pratama;
6. Kerjasama dgn Dinas Kesehatan untuk PKP dan PIRT;
7. Adanya Halal Sehati dan dukungan LP POM MUI ;
8. Pecepatan pengadaan sarpras oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar;
9. Pelaku harus mandiri untuk mencari identitas awal pembuatan NIK.
10. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi
11. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, kemudahan pendampingan akses permodalan terkait program dedikasi Bupati Kredit Kukar Idaman antara pelaku usaha dan pihak perbankan (Bankaltimtara)

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	605.974.921	507.501.164	98.473.757,00	Terjadi Efisiensi
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	684.875.600	574.408.790	110.466.810,00	Terjadi Efisiensi
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	76.577.169	29.573.900	47.003.269,00	Terjadi Efisiensi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	720.122.937	482.908.054	237.214.883	Terjadi Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.184.681.946	1.983.526.435	1.201.155.511,00	Terjadi Efisiensi
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.381.990.877	3.142.575.299	239.415.578	Terjadi Efisiensi

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2025, dapat diketahui bahwa seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran strategis menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Hal ini tercermin dari realisasi kinerja program yang lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada sasaran strategis **konsistensi persentase koperasi aktif**, beberapa program penunjang menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki target anggaran sebesar Rp605.974.921 dengan realisasi sebesar Rp507.501.164, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp98.473.757. Selanjutnya, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi mencatat efisiensi sebesar Rp110.466.810 dari selisih antara target Rp684.875.600 dan realisasi Rp574.408.790. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian juga menunjukkan efisiensi sebesar Rp47.003.269, sementara Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mencatat efisiensi terbesar pada kelompok ini, yaitu sebesar Rp237.214.883.



Pada sasaran strategis **meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru**, efisiensi penggunaan sumber daya juga terlihat cukup signifikan. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) menunjukkan efisiensi sebesar Rp1.201.155.511 dari target anggaran Rp3.184.681.946 dengan realisasi Rp1.983.526.435. Selain itu, Program Pengembangan UMKM mencatat efisiensi sebesar Rp239.415.578 dari target Rp3.381.990.877 dan realisasi Rp3.142.575.299.

Secara keseluruhan, efisiensi yang terjadi pada seluruh program menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara hemat dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Efisiensi ini mengindikasikan adanya pengelolaan anggaran yang baik, tanpa mengurangi efektivitas dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.7.1

Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	605.974.921	507.501.164	83.75 %	Persentase Koperasi Aktif menunjukkan stabilitas di atas 80%, dengan peningkatan signifikan jumlah koperasi aktif, meskipun terjadi sedikit penurunan rasio akibat pertumbuhan jumlah koperasi yang tinggi.
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	684.875.600	574.408.790	83.87%	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	76.577.169	29.573.900	38.62%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	720.122.937	482.908.054	67.1%	



Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.184.681.946	1.983.526.435	62.28%	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menunjukkan tren positif, terutama dari sisi pengembangan UMKM, namun masih memerlukan penguatan pada tahap pemberdayaan dasar. adapun peningkatan hasil diperoleh dari beberapa kriteria yaitu : Legalitas Usaha, Pemasaran, SDM Berkualitas, Pembiayaan Modal.
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8,020,000,000	7,477,926,522	93.24%	

Capaian kinerja program penunjang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi, baik dari sisi tingkat realisasi anggaran maupun kontribusinya terhadap indikator kinerja utama.

Pada sasaran strategis konsistensi persentase koperasi aktif, beberapa program penunjang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terealisasi sebesar 83,75% serta Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 83,87%. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi telah berjalan efektif dalam menjaga stabilitas koperasi aktif di atas 80%. Meskipun demikian, terdapat sedikit penurunan rasio koperasi aktif yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah koperasi baru, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pembinaan dan pengawasan.

Di sisi lain, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mencapai realisasi sebesar 67,10%, yang menunjukkan kinerja cukup namun masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya tahan dan kualitas kelembagaan koperasi. Sementara itu, Program



Pendidikan dan Latihan Perkoperasian hanya mencapai 38,62%, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Rendahnya capaian program ini berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pengelolaan koperasi secara berkelanjutan.

Pada sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) mencatat realisasi sebesar 62,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap tren positif pertumbuhan wirausaha baru. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa aspek penting, antara lain peningkatan legalitas usaha, penguatan pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan modal.

Namun demikian, capaian yang belum optimal menunjukkan masih adanya tantangan, khususnya pada tahap pemberdayaan dasar UMKM yang perlu diperkuat agar mampu menghasilkan wirausaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh efektivitas program pengawasan dan pemberdayaan, sedangkan ketidakefektifan capaian dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksanaan program peningkatan kapasitas serta belum meratanya intervensi pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada program-program yang memiliki capaian rendah agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis di masa mendatang.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2025. Dalam mencapai indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi, UKM didukung oleh anggaran dari APBD.

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan
Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keuangan			
					Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Sisa Anggaran
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.154.549.605,00	10.149.834.790,00	83,51%	2.004.714.815,00
1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.856.622,00	164.706.600	48,04%	178.150.022,00
1	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	209.424.622,00	146.005.000	69,72%	63.419.622,00
1	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0
1	1	3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.244.000,00	6.690.000	50,51%	6.554.000,00
1	1	4		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0
1	1	5		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	120.188.000,00	12.011.600	9,99%	108.176.400,00
1	1	6		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0
1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.340.786.510	8.446.450.597	90,43%	894.335.913
1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.209.373.374	8.362.510.597	90,80%	846.862.777
1	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.650.000	0	0%	18.650.000
1	2	3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0
1	2	4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	102.763.496	80.590.000	78,42%	22.173.496
1	2	3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.999.640	3.350.000	33,50%	6.649.640
1	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.538.868	56.260.000	56,52%	43.278.868
1	3	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.755.456	6.060.000	56,34%	4.695.456
1	3	2		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	72.561.318	50.200.000	69,18%	22.361.318



1	3	3		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.222.094	0	0%	16.222.094
1	4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
1	4	1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0
1	5			Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.454.063	462.586.482	84,34%	85.867.581
1	5	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.531	8.257.290	82,59%	1.741.241
1	5	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.914.669	38.828.800	99,78%	85.869
1	5	3		Penyediaan Bahan Logistik Kanto	38.317.397	26.635.710	69,51%	11.681.687
1	5	4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan J	41.071.064	30.249.145	73,65%	10.821.919
1	5	5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	16.800.000	67,20%	8.200.000
1	5	6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.915.952	95.826.637	86,40%	15.089.315
1	5	7		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0
1	5	8		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan SKPD Berbasis Elektronik pada	284.236.450	245.988.900	86,54%	38.247.550
1	6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203.123.000	166.093.675	81,77%	37.029.325
1	6	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.123.000	166.093.675	81,77%	37.029.325
1	7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.588.664	451.535.854	75,56%	146.052.810
1	7	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.566.200	177.558.789	69,48%	78.007.411
1	7	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.022.464	273.977.065	80,10%	68.045.399
1	8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.022.201.878	402.201.582	39,35%	620.000.296
1	8	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.638.800	81.425.082	45,08%	99.213.718
1	8	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.749.078	18.375.000	61,77%	11.374.078
1	8	3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	811.814.000	302.401.500	37,25%	509.412.500
2				PROGRAM PENGAWASAN DAN	605.974.921	507.501.164	83,75%	98.473.757,00
2	1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				



2	1	1		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	471.754.400	376.443.349	79,80%	95.311.051
2	1	2		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	134.220.521	131.057.815	97,64%	3.162.706
3				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	684.875.600	574.408.790	83,87%	110.466.810,00
3	1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	684.875.600	574.408.790	83,87%	110.466.810
3	1	1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.300.000	38.397.890	95,28%	1.902.110
3	1	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	644.575.600	536.010.900	83,16%	108.564.700
4				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	76.577.169	29.573.900	38,62%	47.003.269,00
4	1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	76.577.169	29.573.900	38,62%	47.003.269
4	1	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	76.577.169	29.573.900	38,62%	47.003.269
5				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	720.122.937	482.908.054	67,06%	237.214.883
5	1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	720.122.937	482.908.054	67,06%	237.214.883
5	1	1		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	720.122.937	482.908.054	67,06%	237.214.883
6				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.184.681.946	1.983.526.4350	62,28%	1.201.155.511,00
6	1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.184.681.946	1.983.526.435	62,28%	1.201.155.511
6	1	1		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	68.115.132	18.435.000	27,06%	49.680.132
6	1	2		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	196.932.891	135.858.802	68,99%	61.074.089
6	1	3		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	431.397.295	309.513.980	71,75%	121.883.315



6	1	5		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.488.236.628	1.519.718.653	61,08%	968.517.975
7				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.381.990.877	3.142.575.299	92,92%	239.415.578
7	1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	3.381.990.877	3.142.575.299	16,84	239.415.578
7	1	1		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.381.990.877	3.142.575.299	92,92%	239.415.578
				TOTAL	Rp. 20.808.773.055	Rp. 16.870.328.432	81.07%	

Secara umum realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan SIPD Penatausahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat penyerapan yang bervariasi pada masing-masing program dan kegiatan. Total realisasi anggaran pada beberapa program utama berada pada kategori cukup hingga sangat tinggi, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan dengan serapan rendah bahkan tidak terealisasi. Total pada tahun 2025 sebesar Rp. 20.808.773.055, Realisasi sebesar Rp. 16.870.328.432 atau 81.07%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp12.154.549.605,00 dengan realisasi sebesar Rp10.149.834.790,00 atau sebesar 83,51%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.004.714.815,00. Penyerapan terbesar terdapat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 90,43%, terutama didukung oleh pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Namun demikian, beberapa sub kegiatan seperti koordinasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tidak terealisasi. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, realisasi hanya mencapai 48,04%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan, seperti pengumpulan data statistik sektoral yang hanya mencapai 9,99% serta beberapa kegiatan lain yang tidak dilaksanakan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi sebesar 84,34%. Hampir seluruh sub kegiatan terlaksana dengan baik, khususnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang mencapai 99,78%. Sementara itu, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah memiliki realisasi yang relatif rendah yaitu 39,35%, yang dipengaruhi oleh rendahnya pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, realisasi mencapai 83,75% dari pagu Rp605.974.921,00. Sub kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi menunjukkan capaian sangat tinggi yaitu 97,64%, yang mencerminkan optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi mencatat realisasi sebesar 83,87% dari pagu Rp684.875.600,00. Penilaian kesehatan koperasi secara umum berjalan baik, khususnya pada aspek tata kelola dan kinerja keuangan.



Namun demikian, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian menunjukkan realisasi yang rendah, yaitu hanya 38,62%, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM koperasi.

Pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, realisasi mencapai 67,06%, yang menunjukkan pelaksanaan program sudah berjalan namun masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek produktivitas dan akses pasar koperasi.

Untuk Program Pemberdayaan UMKM, realisasi sebesar 62,28% dari pagu Rp3.184.681.946,00. Beberapa kegiatan seperti kemitraan usaha mikro masih rendah (27,06%), sedangkan kegiatan penguatan kelembagaan menunjukkan capaian yang cukup baik. Sementara itu, Program Pengembangan UMKM mencatat kinerja terbaik dengan realisasi sebesar 92,92% dari pagu Rp3.381.990.877,00. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan usaha mikro menuju skala usaha yang lebih tinggi, terutama pada aspek produksi, pemasaran, dan penguatan SDM.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja organisasi selama satu tahun anggaran.

Secara umum, kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana seluruh indikator kinerja utama dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator seperti persentase koperasi aktif, pertumbuhan wirausaha baru, serta tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan koperasi dan usaha mikro di daerah.

Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses permodalan, penguasaan teknologi, serta kapasitas kelembagaan koperasi dan pelaku usaha mikro yang masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan guna mempertahankan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan dan dampak program di masa mendatang.

4.2 Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan manajemen usaha;
2. Memperluas akses permodalan, pemasaran, dan legalitas usaha guna mendorong pertumbuhan wirausaha baru yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran dan pengelolaan usaha;



5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro;
6. Mendorong inovasi program dan kegiatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada hasil dan dampak.

Dengan pelaksanaan saran tersebut, diharapkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kutai Kartanegara, 30 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH



Muhammad Reza, S.T., M. Si.

Pembina / IV a

















NIP. 19821229/200604 1 009

LAMPIRAN


**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi	
26 Jan sd 02 Februari 2025	<p>Dalam Rangka Pendampingan Koperasi Fasilitasi Akses Pemasaran / Promosi Produk Koperas Mengikuti Pameran Merah Putih ke 78 Tahun 2025 di Kecamatan Sanga-Sanga.</p>		
4 Feb 2025	<p>Penguatan Kemitraan Koperasi Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan Kemitraan Koperasi dengan PT EAS</p>		
6 Feb 2025	<p>Penguatan Kemitraan Koperasi Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Koperasi dengan PT REA KALTIM PLANTATIONS</p>		
18 Feb 2025	<p>Penguatan Kemitraan Koperasi Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Koperasi dengan PT REA KALTIM PLANTATIONS</p>		











**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>9 sd 11 Jan 2025</p>	<p>Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pernyataan Mandiri (Self Declare) Koperasi Pengelola Usaha Simpan Pinjam ke Kementerian Koperasi dan UKM RI Jakarta</p>		
<p>26 Feb 2025</p>	<p>Bimbingan Digitalisasi Pelaporan Koperasi melalui Pembuatan Akun ODS Mandiri Koperasi di Ruang Digitalisasi</p>	 	 
<p>9 Mei 2025</p>	<p>Kemitraan Koperasi KPSSSJ Desa Sedulang dan Koperasi KPPSSJ Desa Puan Cepak dengan PT Maju Kalimantan Hadapan di Balikpapan</p>		
<p>5 sd 8 Mei 2025</p>	<p>Dalam rangka mengikuti uji kompetensi bidang pengawasan koperasi tahun 2025 di Sleman</p>		
<p>21 sd 24 Mei 2025</p>	<p>Pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Muara Muntai (Endri dkk)</p>		
<p>21 Mei 2025</p>	<p>Pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Kota Bangun Darat (Rian Korompis)</p>		
<p>21 sd 23 Mei 2025</p>	<p>Pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Marang Kayu (Rian Korompis)</p>		













**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>20 Juni 2025</p>	<p>Bimbingan/Pendampingan Pembuatan Npwp Dan Perpajakan Koperasi</p>		
<p>21 Juni 2025</p>	<p>Rapat Kerja Rekonsiliasi Nilai Neraca pada LK SKPD TA 2024 di Samarinda (Prayetno, A.Sy Fathul Jannah)</p>		
<p>20 sd 21 Juli</p>	<p>Persiapan dan Pelaksanaan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak;(An Endri, Prayetno dkk)</p>		
<p>22 Juli</p>	<p>Menghadiri Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Penyaluran KUR di Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Samarinda (An Endri, Prayetno)</p>		













**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>8 Agustus</p>	<p>Menghadiri FGD Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 (An Endri)</p>		
<p>13 Agustus</p>	<p>Dalam Rangka Menghadiri Peresmian Koperasi Merah Putih Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Tahun 2025 (An Endri)</p>		
<p>20 Agustus</p>	<p>Menghadiri Sharing Session bertema Penerapan Sistem Informasi Geospasial dengan akurasi data dan kecepatan layanan bagi masyarakat 2025 (An Endri)</p>		
<p>21 Agustus</p>	<p>Sharing Kegiatan bersama Diperindagkop Provinsi Kaltim dengan tema Membangun Kolaborasi dan Kemandirian UMKM Melalui Sosialisasi Kemitraan, Aplikasi Digital dan Pembiayaan Bersama KDMP di Kutai Kartanegara,</p>		 
<p>22 Agustus</p>	<p>Kunjungan BKDHDH Peresmian Kantor Koperasi Merah Putih Desa Batuah Kecamatan Loa Janan.masyarakat 2025 (An Endri)</p>		

**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p style="text-align: center;">29 Agustus</p>	<p>Penilaian Koperasi TKBM Karya Sejahtera Samboja;</p>		
<p style="text-align: center;">16 sd 17 Okt 2025</p>	<p>Audiensi ke Kementerian Koperasi RI di Jakarta selama 2 (dua) hari dari tanggal 16 s/d 17 Oktober 2025 an. H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P.</p>		
<p style="text-align: center;">17 Okt 2025</p>	<p>Rapat Koordinasi Pendampingan KDKMP Kutai Kartanegara, hari Jumat di Ruang Smesco</p>		
<p style="text-align: center;">27 Okt 2025</p>	<p>Dalam rangka Persiapan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pendamping Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih di Samarinda selama 1 (satu) hari tanggal an. H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P</p>		
<p style="text-align: center;">31 Oktober 2025</p>	<p>Dalam rangka pendampingan kunjungan lapangan dan fasilitasi pengendalian pelaksanaan KDKMP Tahun 2025 di KDKMP Tanah Datar Kecamatan Muara Badak an. Prayctno, S.Sos. dkk</p>		
<p style="text-align: center;">28 November 2025</p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendampingan KDKMP Kutai Kartanegara, hari Jumat 28 November 2025</p>		

**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>13 s/d 15 November 2025</p>	<p>Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus KDKMP di PendopoTenggarong</p>	 	 
<p>27 November 2025</p>	<p>Dalam rangka Menghadiri undangan peresmian toko UMKM Sejahtera Bersama di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang selama 1 (satu) hari tanggal 27 November 2025, an. A. Sy. Fathul Jannah, S.Hut. dkk</p>		
<p>18 November 2025</p>	<p>Dalam rangka Menghadiri Sosialisasi kepada masyarakat tentang Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan an. Abdul Sani, S.H. dkk</p>		
<p>1 Des 2025</p>	<p>Peninjauan dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kapasitas Pengurus KDKMP di Kecamatan Kota Bangun an. A. Sy. Fathul Jannah, S.Hut</p>		
<p>4 sd 6 Des 2025</p>	<p>Kunjungan Kerja Pansus di Kementerian UMKM dan Koordinasi di Kementerian Koperasi an. H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi.,M.A.P</p>		

**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>2 sd 5 Des 2025</p>	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Kota Bangun selama 4 (empat) hari dari tanggal 2 s/d 5 November 2025 an. A. Sy. Fathul Jannah, S.Hut.</p>	 	 
<p>8 Des 2025</p>	<p>Dalam rangka Kunjungan Studi Tiru Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Samarinda, hari Senin 8 Desember 2025 di Ruang Smesco</p>		
<p>8 sd 11 Des 2025</p>	<p>Dalam rangka Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Muara Kaman selama 4 (empat) hari dari tanggal 08 s/d 11 Desember 2025 an. Maisyarah, S.Sos Dkk</p>		
<p>8 sd 11 Des 2025</p>	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Kembang Jangut selama 4 (empat) hari dari tanggal 08 s/d 11 Desember 2025 an. Abdul Sani, S.H Dkk</p>	 	 

**DOKUMENTASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

<p>4 sd 17 Des 2025</p>	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Muara Badak selama 4 (empat) hari dari tanggal 14 s/d 17 Desember 2025 an. Maisyarah, S.Sos Dkk</p>		
<p>4 sd 17 Des 2025</p>	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Tabang selama 4 (empat) hari dari tanggal 14 s/d 17 Desember 2025 an. Lela Elvita, S.Sos Dkk</p>	 	 
<p>4 sd 17 Des 2025</p>	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Pengurus KDKMP di Kecamatan Muara Jawa selama 4 (empat) hari dari tanggal 14 s/d 17 Desember 2025 an. A. Sy. Fathul Jannah, S.Hut Dkk</p>	 	 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
TAHUN 2025